

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN PROFIL PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

1 Kode Perangkat Daerah : 71000001

2 Nomenklatur Perangkat Daerah : Kecamatan Ciputat

3 Urusan : Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

4 Sejarah Kecamatan Ciputat

Berdasarkan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan ditetapkan juga sebagai daerah otonom. Melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan ditetapkannya ex Kewedanaan Ciputat menjadi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Ciputat merupakan salah satu wilayah Kota Tangerang Selatan yang mengalami pemekaran pada tanggal 30 Januari 2006. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Ciputat, maka wilayah Kecamatan Ciputat terdiri dari 7 (Tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Ciputat, Kelurahan Sawah, Kelurahan Serua Indah, Kelurahan Jombang, dan Kelurahan Cipayung.

5 Tempat dan Kedudukan

5.1 Alamat : Jl. Cendrawasih Raya No.1 Jurang Mangu Kelurahan.

Sawah

Kecamatan. Ciputat Kota Tangerang Selatan

5.2 Nomor Telepon : 021-741 9399

5.3 Faximil : -

5.4 E-mail : kec.ciputat@gmail.com

5.6 Website : http://ciputat.tangerangselatankota.go.id

5.7 Medial Sosial : Instagram (@kecamatanciputat01)



6 Visi dan Misi

Visi

"TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF dan EFESIEN"

Misi

Kecamatan Ciputat mengampu satu/dua/tugas misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:

- 1. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
- 2. Program Prioritas KDH dan WKDH Periode 2021-2026 (Kecamatan Ciputat);
- 3. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Ciputat.

7 8. 1 Tugas Camat:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;



- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; dan
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar prosedur dan kriteria di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
- penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- f. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan manajemen sumber daya manusia di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- g. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- h. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi public
- i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, mempersiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan

7.2 Fungsi Camat



- Pertanggungjawaban Walikota di lingkup Kecamatan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

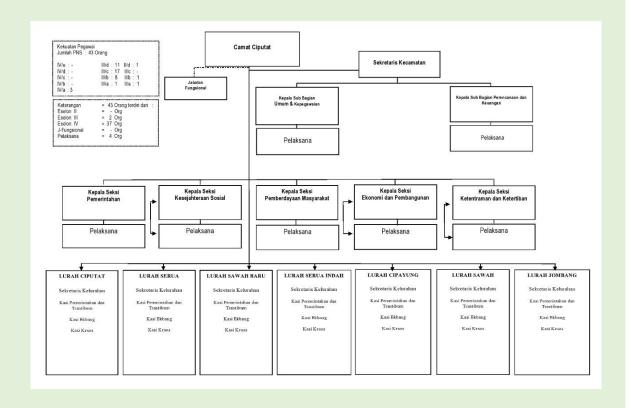
8 Struktur Organisasi Kecamatan Ciputat

- 1 2. Camat
 - 3. Sekretariat;
 - 4. Seksi Pemerintahan;
 - 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 8. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 9. Kelurahan Sawah Baru;
 - 10. Kelurahan Serua;
 - 11. Kelurahan Ciputat;
 - 12. Kelurahan Sawah;
 - 13. Kelurahan Serua Indah;
 - 14. Kelurahan Jombang;
 - 15.Kelurahan Cipayung; dan
 - 16. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi

Kecamatan Ciputat





9 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas ,,,, terdiri dari dukungan pegawai berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai ASN dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada table berikut:

Tabel Jumlah Pegawau Menurut Status Dan Jenis Kelamin

Status	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3
PNS	33	15
Non PNS	117	34
Jumlah (%)	61,98%	38,02%

Tabel Jumlah Pegawau Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Status	Golongan/Ruang	Jumlah
1	2	3
Pembina Utama Muda	-	-
Pembina Tk I	-	-
Pembina	IV/a	1
Penata Tk I	III/d	17
Penata	III/c	13
Penata Muda Tk I	III/b	12
Penata Muda	III/a	2
Pengatur Tk I	II/d	1
Pengatur Muda Tk I	II/b	2
Pengatur Muda	II/a	-

Gambar : Persentase SDM

10 Program



Program yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

11 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Daltal Regiatal dan Sub Regiatali		
Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja
1	2	3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	7 Dokumen
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD.	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	4 Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	8 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1 Laporan
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.	1 Dokumen



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	4 Laporan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	4 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	4 Dokumen
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	4 Dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan.	8 Dokumen
	Fasilitasi Percepatan, Pencapaian, Standar Pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan.	2 Laporan
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	1 Tahun
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diLimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan.	1 Kegiatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.	4 Kegiatan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	5 Laporan
	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	1 Laporan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1 Kegiatan



Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Derah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1 Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan.	1 Dokumen
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	1 Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	1 Dokumen
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	1 Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	1 Dokumen
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	1 Kegiatan



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	1 Dokumen
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	1 Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	1 Dokumen
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	1 Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	1 Dokumen
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	1 Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Tahun
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	1 Dokumen
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	1 Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	1 Kegiatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Penjediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Penbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Penjediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan. Pembangunan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.



12 Jenis Layanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **Kecamatan Ciputat** pelayanan yang diselenggarakan di setiap di unit kerja di informasikan sebagai berikut:

Tabel:

Unit Kerja	Jenis Layanan
1	2
Sekretariat	 Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Keuangan lingkup Dinas Pengelolaan Naskah dan Arsip Dinas PPID Pembantu Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (Form 1721-A2)
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pelayanan Surat Pemberitahuan Warga Untuk persyaratan IMB
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Memfasilitasi Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemerintahan	 Domisili Partai dan Lembaga BPHTB PBB Pertanahan Susunan Keluarga Keterangan Pensiun Keterangan Persyaratan Pendaftaran Polisi/TNI
Bidang Kesejahteraan Sosial	SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Domisili Yayasan Surat Pernyataan Waris Dispensasi Nikah
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penertiban dan Monitoring